

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN KOMUNAL

Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom.¹

Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara

Arief Sirajuddin S. S.ST., M.I.Kom.²

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, Jl. Malino Km. 7 Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi
Selatan

ABSTRAK

Perhatian pemerintah yang lebih tertuju pada pembangunan fisik dengan mengabaikan kearifan lokal mengakibatkan Indonesia mulai mengalami pergeseran tata nilai kehidupannya serta hilangnya karakter sebagai bangsa yang berbudaya. Terbaikannya nilai-nilai kearifan lokal berujung pada hilangnya semangat kebersamaan yang menjadi ciri bangsa Indonesia serta ancaman hilangnya kelestarian budaya yang ada disetiap daerah di nusantara. Hilangnya semangat kebersamaan dan persaudaraan menjadi bibit lahirnya konflik dan disintegrasi. Ancaman konflik horizontal di Indonesia sangat rentan terjadi setiap saat. Mulai dari konflik SARA, konflik elite akibat dari pertarungan suksesi politik dalam semua tingkatan suksesi, dan konflik sektarianisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu mengumpulkan fakta melalui observasi, literatur kepustakaan dan tulisan dimedia. Fakta menunjukkan bahwa konflik adalah bahaya laten yang dapat terjadi kapanpun. Apalagi, Indonesia adalah negara majemuk yang terdiridari berbagai suku dan budaya. Konflik yang terjadi salahsatunya diakibatkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola potensi konflik melalui pembangunan komunikasi berbasis kearifan lokal. Konflik umumnya sangat potensial terjadi di daerah yang sedang menuju kota besar atau daerah tujuan berinvestasi. Sehingga seorang pemimpin khususnya kepala daerah dituntut memiliki *communication skill* terkait dengan seluruh bagian-bagian dalam kehidupan masyarakat di wilayahnya. Banyaknya konflik yang terjadi di suatu daerah mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlandaskan kearifan lokal oleh kepala daerah kepada masyarakatnya belum secara maksimal atau bahkan tidak dilakukan. Penyertaan nilai kearifan lokal dalam membangun komunikasi dengan semua pihak akan membantu mencari solusi terhadap penanganan dan pencegahan konflik sehingga pembangunan dapat berjalan lancar menuju masyarakat yang modern tanpa kehilangan identitas lokalnya.

Kata-Kata Kunci: Kearifan Lokal, Komunikasi, Pemerintah Daerah, Konflik Sosial dan Komunal.

LOCAL WISDOM AS BASIS OF GOVERNMENT COMMUNICATIONS IN COMPLETION OF SOCIAL AND COMMUNAL CONFLICTS

ABSTRACT

The government's focus on physical development by ignoring local wisdom has resulted in Indonesia beginning to experience a shift in the values of its life and the loss of character as a cultured nation. The neglect of the values of local wisdom leads to the loss of spirit of togetherness that characterizes the Indonesian nation and the threat of loss of cultural sustainability that exist in every region in the archipelago. The loss of the spirit of togetherness and brotherhood becomes the seed of the birth of conflict and disintegration.

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN KOMUNAL

The threat of horizontal conflict in Indonesia is very vulnerable at all times. Ranging from SARA conflicts, elite conflicts resulting from political succession struggles at all levels of succession, and sectarian conflict. This research uses qualitative method with descriptive analysis approach that is collecting facts through observation, literature and literature writing dimedia. The facts show that conflict is a latent danger that can happen at any time. Moreover, Indonesia is a plural country consisting of various tribes and cultures. Conflict is one of the causes of the government's inability to manage the potential for conflict through the development of local wisdom-based communication. Conflict is generally very potential to occur in areas that are heading to big cities or destination areas to invest. So a leader, especially the head of the region is required to have communication skills related to all parts of community life in the region. The number of conflicts that occurred in a region indicates that communication based on local wisdom by the head of the region to the community has not been maximally or even not done. Inclusion of local wisdom values in building communication with all parties will help to find solutions to the handling and prevention of conflict so that development can run smoothly to modern society without losing its local identity.

Keywords: *Local Wisdom, communication, local government, social conflict and, comunal.*

Korespondensi: Ansar Suherman. Universitas Muhammadiyah Buton. Jl. Betoambari No. 36 Kelurahan Lanto Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, email: ansar.suherman@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terangkai oleh 13.466 pulau dari Sabang sampai Merauke dari Timor sampai Pulau Rote yang keseluruhannya memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah dengan pemilik suku bangsa terbanyak di dunia yakni berjumlah 13.000 lebih suku bangsa. Kekayaan sumber daya alam dan bonus surplus demografis tidak hanya sebagai keuntungan dalam mempercepat roda pembangunan namun juga dapat menjadi rintangan atau permasalahan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengatasi berbagai macam persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat menghambat proses pembangunan dan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, seharusnya bangsa kita telah menjadi negara maju yang besar. Sebagai bangsa yang majemuk dan besar, Pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan lebih dalam mewujudkan dan mempraktekkan *good governance*. Terlebih Indonesia selalu berada dalam bayang-bayang konflik sosial dan komunal (konflik sosial, SARA, konflik politik, konflik ekonomi, dan lainlain) yang terus terjadi setiap tahunnya.

Sebagai langkah antisipatif pemerintah, maka strategi komunikasi yang efektif mesti dijalankan dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat setempat. Kegagalan komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya umumnya disebabkan oleh ketidakpekaan pemerintah dalam membangun komunikasi yang berbasis *local wisdom* tersebut. Pendekatan yang diambil pemerintah lebih cenderung pragmatis dan sepihak terutama dalam proses pembangunan sehingga suara-suara protes dan gerak perlawanan

rakyat kerap terjadi yang disebabkan kepentingan masyarakat tidak terakomodir dan bahkan nilai-nilai sosial masyarakat setempat terabaikan.

Komunikasi pemerintahan yang efektif dengan berbasiskan kearifan lokal hanyamampu dipraktekkan oleh pemimpin daerah yang memiliki kemampuan komunikasi dengan berlandaskan pada cara pandang hidup dan berbagai aktifitas masyarakat dalam pemenuhan setiap persoalan dan kebutuhan masyarakat lokal. Singkatnya, kearifan lokal adalah hal yang bersangkut paut dengan *local culture*.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kearifan lokal

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup (Suyatno, 2011). Di Indonesia—yang kita kenal sebagai Nusantara—kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi kegenerasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, *folklore*), dan manuskrip.

Tantangan globalisasi yang tanpa kenal lelah secara terus menerus menawarkan perubahan gaya hidup menjadi sebuah ancaman tersendiri dalam upaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai warisan budaya kepada generasi muda. Gaya hidup pragmatis, konsumerisme, dan hedonisme menjadi penghambat pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Menurut Suyana (2011), secara faktual dapat kita saksikan bagaimana kearifan lokal yang sarat kebijakan dan filosofi hidup nyaris tidak terimplementasikan dalam praktik hidup yang makin pragmatis. Tulisan Boni Hargens (2011) di Kompas menyatakan bahwa arus modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi semestinya tidak meniadakan suatu negara jatuh dalam percaturan global asal saja negara tersebut ditopang oleh identitas nasional yang kuat, tetapi juga didukung oleh ideologi dan kepemimpinan politik yang kuat.

Menurut Rahyono (2009: 7), kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

2. Komunikasi Pemerintahan

Dalam pengertian umum komunikasi adalah hubungan dan interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksi itu terjadi karena seseorang menyampaikan pesan dalam bentuk lambang-lambang tertentu, diterima oleh pihak lain yang menjadi sasaran,

sehingga sedikit banyak mempengaruhi sikap dan tingkah laku pihak dimaksud. Anggota masyarakat melakukan komunikasi ini secara terus menerus. Oleh karena itu, dapat dipahami, komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat dimanapun dan kapan pun.

Gambaran ini memberikan bahwa objek studi ilmu komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi di masyarakat. Berhubung objek tersebut mencakup masyarakat yang luas, maka titik berat perhatian ilmu komunikasi mencakup komunikasi antar pribadi atau komunikasi langsung/tatap muka, yang mencakup komunikasi melalui media massa termasuk persentuhan dunia komunikasi dengan dunia pemerintahan.

Menurut Mulyana, 2001 (dalam Wardhani, 9:2014), dipersyaratkan bahwa dalam setiap peristiwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya oleh kepala daerah kepada masyarakatnya, bahwa kepala daerah sepatutnya memiliki kemampuan untuk memahami setiap makna komunikasi yang disampaikan atau diperlihatkan oleh masyarakatnya baik berupa simbol verbal maupun non verbal, tidak kemudian memaksakan kehendak kekuasaan dan pendapatnya kepada masyarakat.

3. Konflik sosial

Konflik berasal dari kata kerja latin *configure*, yang berarti saling memukul. Yang dimaksud dengan konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Dengan demikian, terjadilah persaingan hingga menimbulkan suatu benturan-benturan fisik baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar.

Menurut Berstein, menyebutkan bahwa konflik merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang belum pernah dicegah, konflik mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan ada pula yang negative didalam interaksi manusia.

Sedangkan Johnson, 1990 (dalam Sumartias dan Rahmat, 2013: 3) menyatakan bahwa secara sederhana, konflik adalah pertentangan antara satu individu dengan individu lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Sebetulnya, konflik dapat dilihat dari dua segi. Dari segi positif, konflik dapat mendinamisasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat memacu bagi terjadinya kompetisi yang sehat, orang berupaya untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya. Konflik bisa menjadi tahap awal perubahan sosial. Dari segi negatif, konflik merupakan salah satu masalah yang perlu diatasi. Konflik yang sengit dapat memicu perselisihan dan permusuhan yang tajam, yang mengganggu suasana antarkelompok dalam masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan pada penulisan ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu mengumpulkan fakta melalui observasi, literature kepustakaan dan tulisan media kemudian menguraikan secara menyeluruh sesuai dengan persoalan dan langkah penyelesaian permasalahannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi dan Kepemimpinan Kepala Daerah

Sejak bergulirnya otonomi daerah di Indonesia, daerah-daerah dituntut untuk memiliki kemampuan secara mandiri dalam memaksimalkan potensi sumber daya daerahnya untuk dijadikan modal dalam pembangunan daerahnya masing-masing. Pelaksana anotonomi daerah tidak hanya berdasarkan pada aturan hukum, namun juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata & bertanggung jawab dalam mengelola daerahnya. Konsep desentralisasi meupakan bagian dari praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah dengan karakteristiknya yaitu sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat, diberikan kepada pemerintah daerah. Menurut John Locke, “.....*Desentralisation is to choose between a dispension of power and unification of power.*”. *Dispension power* bersesuaian dengan teori pemisahan kekuasaan, dimana salah satunya bertujuan agar masyarakat lokal memberikan dukungan dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal.

Berdasarkan salah satu tujuan dari teori tersebut, menyiratkan bahwa pemimpin daerah harus memiliki kemampuan mengkomunikasikan dengan seluruh pihak agar tercipta dukungan dan partisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan terutama dalam proses pembangunan daerah. Ketidakmapuan pemimpin daerah dalam membangun komunikasi secara efektif hanya akan menimbulkan kegaduhan di daerah tersebut. Kemampuan komunikasi organisasi seorang pemimpin daerah sangat menentukan keberhasilan organisasi birokrasi pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Seorang kepala daerah adalah pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang organisasi dan kemampuan di bidang sosial. Kepemimpinan di bidang organisasi berkaitan dengan kemampuannya dalam mengorganisir aparatur birokrasinya atau bawahannya agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing secara profesional dan bertanggung jawab, sedangkan kemampuan di bidang sosial adalah kemampuan yang diperoleh pemimpin dari proses politik. Untuk dapat memaksimalkan dua kemampuan tersebut, maka syaratnya adalah pemimpin wajib memiliki kemampuan mengelola komunikasi yang baik, tidak hanya dengan bawahannya namun yang tidak kalah pentingnya adalah membangun komunikasi dengan masyarakat lokal yang dipimpinnya dengan selalu berlandaskan pada kearifan lokal masyarakat setempat.

Kemampuan pemimpin daerah dalam membangun komunikasi yang efektif baik dengan bawahannya maupun dengan masyarakatnya tentunya akan meningkatkan

kredibilitas serta menguatkan kapabilitasnya. Kredibilitas merupakan seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat komunikator dengan khalayaknya.

Sehingga sesungguhnya kredibilitas tidak melekat dalam diri komunikator. Kredibilitas mencakup dua komponen yaitu keahlian dan dapat dipercaya. Keahlian adalah kesan yang dibentuk oleh khalayak tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan seperti cerdas, mampu, ahli, berpengalaman atau terlatih. Sedangkan kepercayaan adalah kesan khalayak tentang komunikator yang berkaitan dengan wataknya seperti jujur, bermoral, tulus, adil, sopan dan sebagainya. (Rakhmat, 1991 dalam Corry, 2014).

2. Komunikasi dan Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. (Ngakan dalam Akhmar dan Syarifudin, 2007).

1300 suku bangsa yang mendiami seluruh penjuru negeri ini masing-masing memiliki keunikan dan kearifan lokal yang berbeda-beda pula. Keanekaragaman kearifan lokal tersebut menuntut pemerintah, khususnya pemerintah daerah harus cermat dan tepat dalam membangun komunikasi dengan selalu berlandaskan kearifan lokal masyarakat setempat. Tujuannya tidak hanya untuk meminimalisir potensi konflik sosial dan komunal, namun yang tidak kalah pentingnya adalah agar produk kebijakan pemerintah dan sasaran serta tujuan hasil pembangunan dapat bermanfaat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat lokal.

Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah dan proyek-proyek pembangunan yang selalu mendapatkan protes keras bahkan perlawanan dari masyarakat disebabkan tidak terbangunnya komunikasi dari awalnya antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga lahirlah kebijakan yang tidak populis dan hasil pembangunan yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat lokal atau dengan kata lain, pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa beda ras, etnik, atau sosio ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini). Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi (Tubbs, Moss:1996). Komunikasi antar budaya bertujuan untuk memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi, mengkomunikasikan antar orang yang berbeda

budaya, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi, membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya, meningkatkan ketrampilan verbal dan non verbal dalam komunikasi, dan menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif.

Komunikasi antar budaya tidak hanya diperuntukkan dalam memahami budaya dari negara atau tempat orang lain, akan tetapi juga dapat digunakan oleh pemimpin dalam memahami karakteristik nilai-nilai kearifan lokal yang dianut dan diyakini oleh masyarakat lokal, terlebih dalam lingkungan masyarakat Indonesia masih banyak mitos-mitos sosial yang tetap dipegang teguh dan diyakini serta diwariskan, sehingga menabrak mitos-mitos tersebut hanya akan menimbulkan konflik dan pertentangan.

Meskipun ada usaha mewariskan *local wisdom* dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa *local wisdom* tersebut akan sanggup bertahan dalam menghadapi gempuran dan tuntutan globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang pragmatis dan konsumtif. Setiap hari dapat kita saksikan bagaimana kearifan lokal yang penuh akan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan nilai-nilai filosofi hidup nyaris tidak terwujud dalam praktik hidup yang makin pragmatis dan konsumtif.

3. Permasalahan Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat.

Konflik sosial dan komunal yang terjadi di masyarakat seringkali mereduksi nilai-nilai toleransi dan kebersamaan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Perubahan terhadap nilai-nilai sosiokultural ikut menggeser orientasi nilainya pula. Budaya toleransi saat ini telah menjadi barang pusaka peninggalan sejarah yang hanya mampu kita koleksi tapi tidak dapat termanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Idealnya, *local wisdom* yang dimiliki masyarakat merupakan identitas bangsa Indonesia, sebab *local wisdom* dapat saja bertransformasi menjadi budaya nasional.

Setiap persoalan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang terjadi disuatu daerah, gugatannya pasti diarahkan ke Pemimpin daerah (kepala daerah), karena kepala daerah lah yang paling bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi didaerahnya. Tidak bertanggung jawab, kurang responsif, tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, adalah bagian kecil dari sekian banyak tuduhan yang selalu di alamatkan kepada kepala daerah atas segala persoalan yang terjadi di daerah. Di sisi yang lain, pemerintah menganggap masyarakat tidak paham dengan agenda dan rencana pembangunan pemerintah daerah. Hal-hal kecil terkait aspirasi masyarakat seperti itu yang terkadang pemerintah abai dalam penanganannya apabila tidak ditangani dengan baik dapat terakumulasi yang kemudian akan memunculkan konflik-konflik.

Upaya pelibatan masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan dan rencana pembangunan di tiap daerah di Indonesia sudah dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). Musrembang merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat sertapihak-pihak lainnya. Akan tetapi, instrumen tersebut dirasa belum memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Arah pembangunan model komunikasi oleh

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN KOMUNAL

pemerintah kepada masyarakat tidak memperhatikan nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat setempat, sehingga pemerintah daerah terkesan jalan sendiri sesuai dengan keinginannya.

Konflik antara pemerintah dan masyarakat paling sering terjadi di daerah adalah konflik pertanahan. Tanah-tanah milik negara yang ditempati oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun dan telah turun-temurun dikuasai, sering berujung bentrok fisik antara sipil militer dengan masyarakat dan gugat-menggugat di lembaga peradilan.

Bentrok fisik dan gugatan hukum tidak seharusnya terjadi jika saja pemerintah yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan dan mencari jalan keluar permasalahan tersebut dapat menerapkan dan menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat local melalui persuasi kearifan lokal. Tidak sedikit contoh yang bisa kita lihat, di beberapa daerah yang menerapkan persuasi sosial dengan memasukkan nilai-nilai kearifan local dalam proses komunikasinya dapat berjalan dengan tenang dan semua pihak terpuaskan dengan jalan keluar yang ditawarkan.

Pembangunan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menumbuhkan rasa saling percaya sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan harmonisasi di daerah terus terjaga baik antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara sesama kelompok masyarakat di daerah. Keadaan tersebut merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan peningkatan kesejahteraan dan standar kelayakan masyarakat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Salah satu aspek yang turut menentukan laju pembangunan yang berlangsung adalah perlu adanya sinergitas antara pemerintah sebagai penggerak dan penentu kebijakan pembangunan di satu sisi, dengan masyarakat di sisi lain, karena tanpa adanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemilik sumber daya, ataupun tanpa partisipasi nyata dari masyarakat dalam pembangunan maka pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya akan mengalami hambatan dan akan berjalan tidak sesuai harapan. Salah satu kunci demi terciptanya kelancaran pembangunan khususnya di daerah adalah peranan komunikasi pemerintahan untuk dapat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat lokal agar masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan tersebut.
- b. Salah satu penyebab terjadi konflik sosial ditengarai diakibatkan oleh kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan kepentingan politik. Ketiadaan pembangunan komunikasi yang berbasis kearifan lokal oleh pemerintah terhadap masyarakat menjadi salah satu penyebab semakin sering terjadinya konflik sosial dan komunal di Indonesia.

2. Saran

- a. Komunikasi pemerintahan yang terbangun hendaknya memperhatikan perkembangan zaman yang terjadi dalam dunia pemerintahan saat ini. Perubahan signifikan yang terjadi dalam dunia pemerintahan adalah dari *government to governance*. Bahwa terjadi perubahan pola interaksi dari sebelumnya yang bersifat kekuasaan semata, berubah dengan melibatkan masyarakat dalam pertukaran informasi dan penggunaan komunikasi dan persuasi sehingga agenda pembangunan dapat melibatkan *stakeholders* secara aktif.
- b. Komunikasi tidak akan menjadi solusi terhadap persoalan konflik sosial maupun konflik komunal yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dan tidak dilaksanakan dengan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Edisi Revisi. Jakarta, Rajawali Pers.
- Cangara, Hafied. (2011). *Komunikasi Politik; Konsep, Teori, dan Strategi*. Edisi Revisi. Jakarta, Rajawali Pers.
- F.X, Rahyono. (2009). *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyasastra.
- Hargens, Boni. (2011). "Indonesia, 'Halo Soekarno'" dalam Kompas, 16 April 2011, Jakarta.
- Jati, Wasisto Raharjo. (2011). "Pembangunan Gerus Kearifan Lokal" dalam Kompas, 20 April 2011, Jakarta.
- Kreps, Gary L. (1990). *Organizational Communication: Theory and Practice*. Allyn & Bacon Incorporated.
- Kriyantono, Rachmat. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Liliweri, Alo. (2011). *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss. (2009). *Theories of Human Communication (Teori Komunikasi)* Edisi 9. Jakarta, Salemba Humanika.
- Mulyana, Deddy. (2001). "Merancang Peran Baru Humas dalam Pengembangan Otonomi Daerah" dalam Jurnal Komunikasi Mediator Volume 2 Nomor 1 Tahun 2001.
- Sumartias, Suwandi. dan Agus Rahmat, (2013). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konflik Sosial*. Jurnal Penelitian Komunikasi, BPPKI Bandung. Vol. 16 No. 1, Juli 2013 : 13-20.
- Suyatno, Suyono. (2011). *Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan*. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366>.
- Syafiie, Inu Kencana & Azhari. (2008). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung, Redika Aditama.

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS KOMUNIKASI PEMERINTAH
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN KOMUNAL

Wardhani, Andy Corry. (2014). *Komunikasi Pemerintahan Berbasis Kearifan Lokal*. <http://digilib.unila.ac.id/1928/1/KOMUNIKASI%20PEMERINTAHAN%20%20DAERAH-ANDY%20CORYY.pdf>